



# SKRIPSI

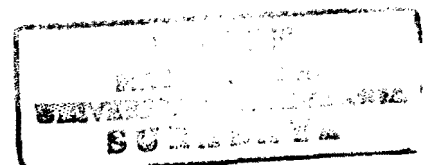
## TANGGUNG JAWAB PJTKI DALAM PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI

Per 141 /05  
Sar  
t



**DWI KURNIA SARI**  
030 111 118 U

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



**TANGGUNG JAWAB PJTKI  
DALAM PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**



**H. Machsoen Ali, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 355 366**



**Dwi Kurnia Sari**  
**NIM. 030111118 U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari penulisan skripsi mengenai Tanggung jawab PJTKI dalam penempatan TKI di luar negeri, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau yang disebut PJTKI merupakan suatu usaha swasta yang berusaha dibidang penempatan tenaga kerja dan merupakan Mitra Kerja Departemen Tenaga Kerja, yang dalam melaksanakan kegiatannya harus sesuai dengan proses Antar Kerja baik di dalam maupun ke luar negeri. Dalam kegiatan penempatan calon TKI merupakan tanggung jawab penuh PJTKI yang dapat dilihat dari tugas, hak dan kewajiban. PJTKI itu sendiri, tanggung jawab tersebut dimulai dari tahap perekrutan calon TKI atau sebelum dilakukan penempatan, penempatan sampai dengan setelah penempatan. Dalam masa-masa tersebut PJTKI mempunyai kewajiban untuk memberikan pelatihan dan ketrampilan kepada calon TKI, melindungi calon TKI tersebut jika terjadi masalah-masalah serta mengurus segala keperluan berkaitan dengan keberangkatan dan kepulangannya kedaerah asal.
- b. Permasalahan yang seringkali timbul antara calon TKI dengan PJTKI itu karena salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya yang terdapat dalam perjanjian penempatan TKI, sehingga pihak lain merasa tidak puas. Untuk menyelesaikan perselisihan itu dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara

yakni dengan musyawarah untuk mufakat antara para pihak-pihak yang berselisih dan bisa juga dengan cara mengikutsertakan pihak ketiga, yakni Depnaker yang diwakili oleh Pegawai Perantara. Mengenai sanksi bagi PJTKI yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan perlindungan kepada calon TKI, dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Saran

Dari penulisan skripsi mengenai Tanggung Jawab PJTKI Dalam Penempatan TKI di Luar Negeri, maka saran yang dapat diberikan adalah :

- a. Dalam melaksanakan kegiatan TKI baik di dalam maupun di luar negeri, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia harus melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Supaya lebih jelas kedudukan PJTKI sebagai perantara TKI pada Pengguna Jasa maka diperlukan suatu peraturan tersendiri yang khusus mengatur tentang PJTKI. Agar dapat melindungi hak-hak TKI dan untuk mencegah pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat merugikan TKI tersebut.
- b. Perlu memasyarakatkan prosedur dan proses mengenai pengiriman penempatan TKI ke luar negeri serta harus memberikan penyuluhan mengenai prosedur dan proses penempatan tersebut dan juga menyangkut penyelesaian perselisihan yang dapat ditempuh jika terjadi perselisihan. Apabila ada penyelewengan tentang penempatan TKI ke luar negeri,

pekerja atau TKI sebaiknya melaporkan hal itu kepada Depnaker dengan melampirkan fakta yang mendukung adanya penyelewengan tersebut. Sanksi yang dijatuhkan pada perusahaan atau PJTKI yang tidak bertanggungjawab hendaknya lebih diperberat, agar perusahaan yang mempunyai itikad baik tersebut menjadi jera.

